

## **Review Jurnal Ilmiah : Capacity and Bureaucratic Culture in Accessibility of Public Information Based on E-Government in Sidoarjo-Indonesia**

**Reviewer : Fadila – 162022000103**

**Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  
Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo. Telp 031-8945444, fax. 031-8949333  
E-mail : [muhdarfadila8@gmail.com](mailto:muhdarfadila8@gmail.com)**

### **Pendahuluan**

Dalam pemikiran (Max Weber), setiap aktivitas yang menuntut koordinasi yang ketat terhadap kegiatan-kegiatan dari sejumlah besar orang dan melibatkan keahlian-keahlian khusus, maka satu-satunya peluang yaitu dengan mengangkat atau menggunakan organisasi birokratik. Alasan penting untuk mengembangkan organisasi birokratik yaitu senantiasa didasarkan hanya pada keunggulan teknis dibandingkan dengan bentuk organisasi lainnya. Adapun orientasi yang dilakukan dalam suatu organisasi dalam membentuk suatu struktur, fungsi, personalia organisasi birokrasi mampu diikuti oleh perubahan kultur organisasi birokrasi dan perilaku manusia-manusia yang terlibat di dalamnya. Apabila perubahan ini dapat terwujud, maka apa yang diharapkan dalam orientasi efektivitas pelayanan publik, akan tercapai.

Keterkaitan sebuah organisasi dalam birokrasi memberikan suatu informasi pada publik tentang bagaimana kebutuhan suatu organisasi dapat dibutuhkan sehingga, dapat memperdaya tinggi pencarian informasi

### **Pembahasan**

Sistem informasi dan organisasi memiliki hubungan yang saling terkait satu sama lain. Sistem informasi harus selalu disesuaikan dengan organisasi. Organisasi harus mampu mengoptimalkan sistem informasi sehingga mendapatkan keuntungan dari teknologi-teknologi yang ada. Interaksi antara teknologi informasi dan organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor mediasi, yaitu lingkungan, kultur, struktur, prosedur baku, proses bisnis, politik, keputusan manajemen, dan peluang. Elemen yang digunakan untuk mengukur kemampuan informasi adalah keterbukaan badan publik dalam memperluas informasi secara aktif yang dibutuhkan oleh masyarakat baik yang diminta atau tidak. Ketersediaan situs web pemerintah, formulir informasi, dan isi informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, memudahkan mendapatkan informasi yang benar, dengan biaya rendah, mudah dimengerti, dan cara / prosedur sederhana (efisiensi), cepat mendownload / memperoleh informasi; kenyamanan dalam mendapatkan / menyampaikan informasi atau berinteraksi dengan pemerintah.

Budaya disebut suatu perangkat asumsi dasar dimana suatu anggota para kelompok menemukan cara untuk memecahkan masalah pokok baik internal maupun eksternal. Birokrasi, sebagaimana organisasi lain pengaruh lingkungan budaya, dalam aktivitasnya juga terlibat

secara intensif melalui pola-pola interaksi yang terbentuk di dalamnya dengan sistem nilai dan budaya lokal. Perilaku birokrasi bergandengan erat dengan pendekatan kultur, yang sekarang ini dalam ilmu administrasi ataupun teori organisasi merupakan aliran mutakhir. Walaupun pendekatan perilaku itu sendiri termasuk aliran neoklasik, akan tetapi aliran kultur memandang bahwa suatu perilaku dapat dipahami melalui pemahaman kultur.

“Budaya birokrasi dapat digambarkan sebagai sebuah sistem atau seperangkat nilai yang memiliki simbol, orientasi nilai, keyakinan, pengetahuan dan pengalaman kehidupan yang terinternalisasi ke dalam pikiran. Seperangkat nilai tersebut diaktualisasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh setiap anggota dari sebuah organisasi yang dinamakan birokrasi. Setiap aspek dalam kehidupan organisasi birokrasi selalu bersinggungan dengan aspek budaya masyarakat setempat”(Agus Dwiyanto 2002). Kapasitas pemerintah daerah dapat mencakup:

- 1) kesiapan birokrasi dalam memberikan akses terhadap informasi publik media secara online dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur,
- 2) komitmen pengembangan e-government sebagai media informasi publik dan peningkatan partisipasi masyarakat dan pembangunan infrastruktur, dan
- 3) kepemimpinan yang memiliki visi masa depan pelayanan publik.

Kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh penguasaan teknologi informasi dari karyawan suatu organisasi. Dengan aplikasi teknologi maka organisasi akan mengalami perubahan sistem manajemen, dari sistem tradisional ke sistem manajemen kontemporer. Teknologi informasi berkaitan dengan pelayanan, hal tersebut dikarenakan salah satu dimensi dari kualitas pelayanan adalah kecepatan pelayanan (Parasuraman et al., 1988 dalam Mardjiono 2009), dimana dimensi tersebut dapat dikaitkan dengan teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi maka pelayanan yang diberikan, khususnya pada organisasi jasa, akan semakin cepat dan akurat.

## Penutup

Sistem kerja teknologi dalam pemerintahan dapat mempermudah masyarakat memperoleh suatu informasi tentang suatu organisasi, dengan menggunakan situs web, dan isi informasi yang lain. Budaya birokrasi pemerintah merupakan harapan besar masyarakat, dengan penyebaran nilai-nilai oleh anggota birokrasi dan adanya organisasi yang memberikan dorongan kepada para pegawai berkomitmen inti dari nilai-nilai yang ada (*core values*) sehingga perubahan Budaya Birokrasi menuju kearah yang lebih baik.

## Referensi

- Abadi, T.W. “ Capacity and Bureaucratic Culture in Accessbilitiy of Public Information Based on E-Govermant in Sidoarjo-Indonesia” . <https://scholar.google.co.id>
- Andrianto, Nico. 2007. Good Government:” Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-government. Malang: Banyumedia Publishing”
- Dermawan Napitipulu. “Kajian Faktor sukses Implementasi E-Government Studi Kasus Kota Bogor” 9 Vol. No 3. Depok Jawa Barat.
- E Prasajo dan T Kurniawan. 2004.” Hambatan dalam Penerapan E-government di Indonesia. Laporan Penelitian. DIA Fisip UI”..
- Gani, A. 2006. Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Industri Kayu Olahan di Kota Makassar Sulawesi Selatan. Disertasi. Malang: Universitas Brawijaya. Tidak diterbitkan.

- Heryana, Toni. "Pengaruh Penerapan E-Government Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah di Kabupaten Cianjur"
- Hanna, N.K. 2010. *Transforming Government and Building the Information Society: Challenges and Opportunities for the Developing World*. Springer New York: University of Maryland.
- Indrajit, Richardus E.. 2002. *Electronic Government*. Yogyakarta: Andi Offset
- \_\_\_\_\_. 2004. *E-government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2008. *Kegagalan Penerapan E-government dan Kegiatan Tidak Produktif dengan Internet*. Yogyakarta. Gama Press.
- Mochamad Ridwan Setya Nurhakim. *Pengaruh Implementasi E-GOVERNMENT Terhadap Perubahan Budaya Birokrasi Untuk Mewujudkan Tranparansi Dan Akuntabilitas Dalam Sistem Pemerintahan Modern*. Vol 11. No 3
- Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi. Jakarta: Kementrian PAN RB.
- Nur, Emilsyah. "Penerapan E-Government Publik Pada Setiap SKPD Berbasis Pelayan di Kota Palu"
- Rokhman , Ali. 2008. *Potret dan Hambatan e-government Indonesia*. Inovasi Online. Edisi Vol 11/XX. Juli 2008.
- Susena, Edy dan Lestari, D.A, "Efektivitas Penerapan Electric Government Terhadap Pelayan Publik di Kabupaten Sragen".
- Suaedi, F. 2005. "Pengaruh Struktur Organisasi, Budaya Organisasi, Kepemimpinan, Aliansi Strategis Terhadap Inovasi Organisasi dan Kinerja Organisasi Hotel Bintang Tiga di Jawa Timur". Ringkasan Disertasi. Malang: Universitas Brawijaya.